

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak terkecuali di Indonesia<sup>1</sup>. UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Sejak krisis moneter ditahun 1997-1998 hampir 80% usaha yang dikategorikan besar mengalami kebangkrutan dan malah UMKM dapat bertahan dalam krisis dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya. Bagi sebagian kalangan UMKM dianggap sebagai sektor usaha yang tahan banting sehingga mampu bertahan dalam kondisi apapun. Tak jarang dengan kemampuan dan keterbatasan tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja walaupun tidak signifikan.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern<sup>2</sup>. Pengembangan UMKM ini menjadikan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan

---

<sup>1</sup>Orchidya Sari. 2011. Pelaksanaan Penjamin Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Lembaga penjamin Kredit (Studi: Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan PT. Askrindo Padang)". Skripsi. Padang. Ilmu Hukum, Universitas Andalas

<sup>2</sup>Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, Saleh Soeaidy. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu). Jurnal Wacana-Vol. 17, No. 2. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

masyarakat<sup>3</sup>. Oleh karena itu peranan pemerintah serta masyarakat sangat penting dalam peningkatan pengembangan UMKM ini.

Pengembangan sendiri merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik puncak menuju kesuksesan. Sedangkan pengertian Pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah<sup>4</sup>. Oleh sebab itu maka pengembangan UMKM perlu optimal karena keberadaan UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara Indonesia. Juga UMKM merupakan salah satu rencana pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang terjadi di tiap tahunnya.

Untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia berbagai kegiatan dan program pun dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa

---

<sup>3</sup>Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsa. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

<sup>4</sup>Peraturan WaliKota Padang No. 60 Tahun 2012 Tentang Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Halaman 2

pengembangan usaha dilakukan terhadap usaha Mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pengembangan usaha dapat meliputi fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan usaha. Pemerintah Pusat dan daerah memprioritaskan pengembangan Usaha mikro, usaha kecil dan menengah dengan berbagai cara<sup>5</sup>. Cara inilah yang akan membantu UMKM dapat berkembang dan tumbuh sehingga Kontribusi UMKM dapat terasa dan terlihat.

Pertumbuhan UMKM sendiri tumbuh dengan pesat sejak krisis moneter ditahun 1998. Dari data Badan Pusat Statistik Nasional di tahun 2012 jumlah UMKM yang ada di Indonesia mendekati 99,99%. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 97,16% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Ditahun 2012 jumlah UMKM yang ada di Indonesia mencapai 55,2 juta unit dengan tingkat serapan tenaga kerja 3 – 5 tenaga kerja pada masing-masing UMKM<sup>6</sup>. Dengan jumlah tersebut pemerintah berharap dapat mengurangi tingkat pengangguran 1 – 2 %.

Sementara itu di Provinsi Sumatra Barat, UMKM juga memiliki jumlah yang cukup tinggi, berikut merupakan data jumlah UMKM di Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2015 sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Menurut PP No. 17 tahun 2013 ada beberapa cara dalam memberdayakan UMKM yaitu:

- a) pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui
- c) pembatasan bagi Usaha Besar;
- d) kemudahan perizinan
- e) penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; atau
- f) fasilitasi teknologi dan informasi.

<sup>6</sup> Hasil olahan peneliti berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2012 tentang Pertumbuhan UMKM di Indonesia

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah			
		Usaha Mikro (unit)	Usaha Kecil (Unit)	Usaha Menengah (Unit)	Total (Unit)
1	Kab. Lima Puluh Kota	271	4.973	43.679	48.923
2	Kab. Solok Selatan	40	913	8.952	9.905
3	Kab. Pasaman	69	3.121	25.351	28.541
4	Kab. Tanah Datar	285	5.772	37.556	43.613
5	Kab. Pasaman Barat	258	5.712	26.391	32.361
6	Kab. Pesisir Selatan	101	5.489	38.497	44.087
7	Kab. Solok	247	4.426	35.437	40.110
8	Kab. Padang Pariaman	292	4.574	37.474	42.340
9	Kab. Agam	301	4.635	42.561	47.497
10	Kab. Sijunjung	99	3.595	19.785	23.479
11	Kab. Dharmasraya	84	2.906	12.797	15.787
12	Kab. Kep. Mentawai	25	246	2.924	3.195
13	Kota Padang	950	39.403	35.883	76.236
14	Kota Sawahlunto	110	2.106	8.923	11.139
15	Kota Padang Panjang	105	2.549	6.769	9.423
16	Kota Bukittinggi	681	8.714	18.953	28.348
17	Kota Payakumbuh	396	4.954	13.895	19.245
18	Kota Solok	257	2.951	8.712	11.920
19	Kota Pariaman	305	2.623	9.401	12.329
Jumlah		4876	109.662	433.940	548.478

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, tahun 2015*

Berdasarkan pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat di dominasi oleh Kota Padang. kurang lebih ada sekitar 76.236 unit usaha UMKM di Kota Padang sedangkan jumlah seluruh pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Barat mencapai 548.478 usaha. Berdasarkan jumlah UMKM tersebut maka peneliti mengambil penelitian di Kota Padang dikarenakan

Kota Padang merupakan dengan Jumlah UMKM terbanyak dibandingkan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatra barat.

Untuk mewujudkan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Padang, yang sesuai dengan PP No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Kota Padang memberikan tugas kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sesuai dengan Perwako Kota Padang No 20 Tahun 2012 tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Walikota Padang No. 60 Tahun 2012 Tentang Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun yang menjadi Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UMKM yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan UMKM serta tugas pembantu dan memiliki fungsi yaitu<sup>7</sup>:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UMKM.
2. Pemberian Perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas Kota dibidang Koperasi dan UMKM
3. Pembinaan dan Pelaksanaan urusan di bidang Koperasi dan UMKM.
4. Pembinaan Unit pelaksana teknis Dinas
5. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan TUPOKSI.

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan UMKM maka Dinas koperasi dan UMKM melaksanakan fungsi Dinas nomor 3 yaitu pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang koperasi dan UMKM. Untuk menjalankan fungsi

---

<sup>7</sup>Website Resmi Pemerintah Kota Padang  
[www.padang.go.id/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper%Itemid=106](http://www.padang.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper%Itemid=106) diakses pada tanggal 27 Januari 2015 puku 17:00 Wib

tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang merancang dan melaksanakan 3 program pengembangan UMKM yaitu<sup>8</sup>:

1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

Adapun fenomena dari ketiga program tersebut ialah pada Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM ialah monev terhadap kredit program dan non program dana bergulir. Maksudnya Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan kepada pelaku Usaha dalam berupa bantuan modal yang nantinya akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut dijelaskan oleh wawancara Kabid Bina Usaha dan Fasilitas permodalan, Bapak Amrizal sebagai berikut<sup>9</sup>:

“...kami membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya berupa peminjaman modal serta nantinya akan di monitor oleh kami sejauh mana dana tersebut bisa dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Dalam pelaksanaan Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif ini Kota Padang juga menerima penghargaan dari Gubernur Provinsi Sumatra Barat melalui Walikota Padang sendiri, seperti dalam pemberian dukungan dalam penumbuhan pemberian bantuan modal kepada UMKM melau

---

<sup>8</sup> hasil olahan peneliti berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2014-2019

<sup>9</sup> Wawancara tanggal 25 Maret 2015 pukul 14.00 WIB

Koperasi jasa keuangan syariah, yang berguna sebagai peningkatan UMKM dalam pembantuan modal yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.<sup>10</sup>

Selanjutnya, Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah salah satu kegiatannya ialah terlaksananya temu usaha kemitraan UMKM. Fenomena yang terjadi adanya kerjasama pelaku UMKM dengan mitra kerja seperti BUMN dan Perbankan. Hal ini dijelaskan oleh Hellines Darti, Pelaku UMKM jenis industri makanan ringan di Kecamatan Kuranji sebagai berikut<sup>11</sup>:

“...pada kegiatan temu usaha kemitraan, saya menjalin kerjasama dengan mitra usaha dari UMKM, seperti menjalin kerja sama dalam peminjaman modal

Seperti pada temu usaha kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, menurut Ketua Panitia temu usaha kemitraan UMKM Kota Padang, Amrizal mengatakan kegiatan ini untuk memberdayakan dan meningkatkan pengetahuan UMKM agar terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri dan mendorong tumbuhnya kemitraan usaha UMKM dengan BUMN dan usaha besar lainnya<sup>12</sup>. Seperti pada gambar 1.1



Sumber: hasil olahan peneliti melalui <http://minangkabaunews.com/artikel-6337-diskop-dan-umkm-padang-bertekad-lahirkan-2000-pengusaha-tiap-tahun.html>

<sup>10</sup><http://minangkabaunews.com/artikel-4864-walikota-padang-terima-penghargaan-koperasi-dari-gubernur-sumbar.html>

<sup>11</sup> Hasil wawancara pada tanggal 16 Oktober 2015 pukul 14:00 wib

<sup>12</sup><http://minangkabaunews.com/artikel-6337-diskop-dan-umkm-padang-bertekad-lahirkan-2000-pengusaha-tiap-tahun.html>

Pada gambar 1.1 tersebut terlihat Dinas Koperasi dan UMKM beserta mitra usaha memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha yang ikut dalam acara temu usaha kemitraan tersebut. Terakhir pada, Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, kegiatannya meliputi penyelenggaraan promosi produk UMKM. Promosi produk UMKM ini dipamerkan dalam acara Padang Fair, dan promosi melalui media massa. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tenaga Pendamping Kecamatan Kuranji, Dewi Anggarini sebagai berikut<sup>13</sup>:

“...dalam mempromosikan produk mereka, kami membantu dalam bentuk mempromosikan melalui media online seperti Facebook, juga kami membantu dalam melaksanakan kegiatan pada Padang fair, sementara di Kantor Camat Kuranji ini kami menyediakan suatu tempat yang mana berisikan produk dari UMKM sendiri.”

Salah satu mempromosikan produk UMKM ialah dengan ikut dalam event padang fair. Padang Fair sebagai agenda tahunan di Kota Padang telah berpartisipasi dalam percepatan pembangunan Kota Padang, terutama di sektor UMKM dan pariwisata. Iven ini diharapkan bisa mendorong masyarakat terus berkarya dalam rangka mempromosikan produk UMKM dan usaha lainnya<sup>14</sup>.

Selain itu juga kota padang juga menerima tanda kehormatan-satya-lencana-pembangunan UMKM oleh Wakil Presiden Republik Indonesia<sup>15</sup>. Berdasarkan fenomena hasil wawancara peneliti tersebut, merupakan alasan peneliti mengambil penelitian pada program pengembangan UMKM. Juga dalam penelitian ini peneliti juga kuatkan dengan beberapa keberhasilan yang pernah

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara pada tanggal 13 Oktober 2015 pukul 14:00 Wib

<sup>14</sup><http://www.koran.padek.co/read/detail/59606>

<sup>15</sup><http://www.inioke.com/berita/okenews/umum/256/13/07/2015/wali-kota-padang-dianugerahi-tanda-kehormatan-satya-lencana-pembangunan>

diraih dalam pengembangan UMKM di Kota Padang, karena peneliti meneliti tentang melihat keberhasilan dari Program pengembangan UMKM ini. Seperti pada tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan UMKM menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan jenis penghargaan satyalencana pambangunan Koperasi dan UMKM<sup>16</sup>. Sementara itu perlu peneliti paparkan pertumbuhan UMKM di Kota Padang mulai dari tahun 2011-2015, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Padang**  
**Pada tahun 2011-2015**

Tahun	Menengah	Kecil	Mikro	Jumlah
2011	12.036	25.333	714	38.083
2012	12.260	25.606	558	38.424
2013	12.580	25.690	500	38.770
2014	34.620	38.634	808	74.062
2015	35.883	39.403	950	76.236

*Sumber: Diolah peneliti dari Data Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, tahun 2015*

Berdasarkan pada tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Padang mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011 sampai 2015, terutama pada tahun 2015 yang mana peningkatan UMKM di Kota Padang lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya, hal ini memperlihatkan peran pemerintah sudah mulai serius dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu peneliti lebih menekankan penelitian di tahun 2015.

Senada dengan data dari jumlah UMKM tahun 2011-2015 oleh Dinas Koperasi dan UMKM, maka hal ini juga dijelaskan berdasarkan hasil wawancara

<sup>16</sup> Hasil olahan peneliti melalui Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014-2019 hal 20

kepada Bapak Amrizal, Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan sebagai berikut<sup>17</sup> :

“...semenjak tahun 2013 memang terjadi peningkatan perkembangan UMKM di Kota Padang, dimana sebelum 2013 jumlah UMKM di Kota Padang berkisar antara tiga puluh delapan ribuan, sedangkan di 2014 dan 2015 jumlah UMKM di Kota Padang berjumlah kurang lebih tujuh puluh enam ribu.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan perkembangan UMKM terutama pada tahun 2015. Ini menandakan bahwa pemerintah sudah mulai serius dalam melakukan pengembangan terhadap UMKM di Kota Padang.

Berikut merupakan rekapitulasi data UMKM potensial Kota Padang tahun 2015 sebagai berikut:



---

<sup>17</sup> Wawancara tanggal 25 Maret 2015 di Dinas Koperasi dan UMKM pukul 14.00 WIB

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Data UMKM Potensial Kota Padang Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jenis Usaha (unit)											Total
		Kuliner	IMR	IKT	Waserda	Jasa	PKL	Pertania	Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Nelayan	
1	Padang Barat	320	371	73	6.716	905	1.044	-	-	-	-	243	9.429
2	Padang Timur	732	229	42	2.228	1.66	428	148	18	12	49	1	5.552
3	Padang Selatan	574	226	63	2.259	1.78	612	10	24	4	11	486	6.053
4	Kototengah	304	322	89	2.258	1.14	676	1.212	98	145	300	509	7.060
5	LubukBegalun	777	128	117	2.821	2.08	715	205	79	24	74	123	7.387
6	Pauh	200	100	48	781	731	39	1574	-	176	20	-	3.669
7	LubukKilangan	297	191	190	3.226	1.02	527	720	105	66	169	-	6.513
8	Kuranji	526	294	133	2.894	1.47	658	3.271	1,504	216	1,383	-	12.349
9	Padang Utara	369	156	61	2.059	1.83	529	81	24	2	28	385	5.532
10	Nanggalo	452	203	134	2.546	3.02	377	513	71	32	91	27	7.471
11	Bungus Teluk Kabung	258	228	58	721	728	70	1.293	768	46	120	931	5.221
<b>Total</b>		4809	2448	1008	28.509	1639	5.675	9027	2.691	723	2,245	2.705	76.236

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Tahun 2015

Penjelasan :  
 IMR = industry makanan ringan  
 IKT = industry kerajinan tangan  
 Waserda = warung serba ada  
 PKL = pedagang kaki lima

Berdasarkan pada tabel 1.3 terlihat bahwa tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan jumlah Usaha mikro ,kecil dan menengah di Kota Padang. Kurang lebih 76.236 unit usaha UMKM yang ada di Kota Padang, terlihat bahwasanya pertumbuhan UMKM di Kota Padang meningkat yang ditandai makin banyaknya pelaku usaha UMKM yang tumbuh di setiap Kecamatan di Kota Padang pada setiap tahun nya.

UMKM potensial ini maksudnya adalah UMKM yang mempunyai potensi seperti kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk berkembang dengan baik. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ada sekita 76.236 unit usaha UMKM yang menjadi potensi yang akan dikembangkan kedepanya, berguna sebagai peningkatan perekonomian khususnya pada masyarakat Kota Padang

Bedasarkan dari data perkembangan Rekapitulasi UMKM potensial di Kota Padang maka, fokus penelitian ini pada jenis usaha industri makanan ringan (IMR). Adapun alasan peneliti memilih fokus penelitian ke jenis usaha IMR sebagai berikut: Makanan ringan merupakan jenis usaha mikro, Makanan ringan merupakan salah satu prioritas yang sedang digalakkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, agar dapat pertumbuhannya lebih meningkat. Berdasarkan wawancara oleh, Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan, Bapak Amrizal sebagai berikut<sup>18</sup>:

“...salah satu yang akan kami tingkatkan pertumbuhan UMKM adalah pada jenis usaha industri makanan ringan, karena IMR ini merupakan suatu jenis usaha dengan bermodalkan kecil yang

---

<sup>18</sup> Wawancara tanggal 25 Maret 2015 di Dinas Koperasi dan UMKM pukul 14.00 WIB

mampu nantinya sebagai peningkat kesejahteraan para pelaku usahanya”

Bedasarkan alasan diataslah peneliti lebih fokus kepada pelaku UMKM jenis Industri Makanan Ringan. Adapun jumlah Data UMKM jenis makanan ringan sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Jumlah Pelaku UMKM Jenis Industri Makanan Ringan (IMR) Di Kecamatan Kota Padang tahun 2015**

No	Kecamatan	Jumlah Jenis Usaha Industri Makanan Ringan (unit)
1	Padang Barat	371
2	Padang Timur	229
3	Padang Selatan	226
4	Koto Tengah	322
5	Lubuk Begalung	128
6	Pauh	100
7	Lubuk Kilangan	191
8	Kuranji	294
9	Padang Utara	156
10	Nanggalo	203
11	Bungus Teluk Kabung	228
	Jumlah	2.448

Sumber: Hasil Olahan Peneliti berdasarkan rekapitulasi data UMKM potensial Kota Padang tahun, 2016

Bedasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa merupakan jumlah Industri Makanan Ringan (IMR) yang ada di Kecamatan di Kota Padang pada tahun 2015. Bedasarkan tabel diatas peneliti memilih fokus kepada 3 Kecamatan yang peningkatan IMR yang paling banyak, karena peneliti melihat kepada ketiga Kecamatan tersebut jumlah unit IMR nya rata-rata diatas 250 unit yang menjadikan salah satu alasan peneliti mengambil 3 Kecamatan ini, adapun Kecamatan Kota Padang yaitu Padang Barat, Koto Tengah dan Kuranji. Juga bedasarkan data tersebut, peneliti memilih Tenaga Pendamping di tiga Kecamatan

tersebut, Tenaga Pendamping sebagai informan yaitu Koordinator dari Tenaga Pendamping di masing-masing kecamatan tersebut.

Untuk dapat menciptakan kinerja yang baik diperlukan sebuah manajemen kerja yang baik sehingga kerja yang akan dilakukan akan dapat berjalan teratur dan sesuai dengan yang di inginkan. Untuk menciptakan manajemen kerja yang baik maka harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang ada sehingga setiap kegiatan diselesaikan sesuai yang di inginkan. Menurut John F Mee fungsi manajemen tersebut terdiri dari 4 macam yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Motivating dan pengawasan.

Pada awal fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan di masa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.<sup>19</sup> Pola perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang membentuk 3 buah program pengembangan UMKM. Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Rusli PN, SE, Kepala Bidang Perencanaan sebagai berikut :<sup>20</sup>

“...untuk melaksanakan pengembangan UMKM ini, kami merancang 3 program pengembangan UMKM yaitu Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, dan Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas koperasi dan UMKM Kota Padang sebelum melaksanakan pengembangan UMKM, maka mereka merancang 3 program Pengembangan UMKM, yang mana program ini

---

<sup>19</sup> Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Cv Haji Masagung, Jakarta, 1980, Hlm 26

<sup>20</sup> Wawancara tanggal 25Maret 2015 di Dinas Koperasi dan UMKM pukul 14.00 WIB

merupakan inti dari terlaksananya kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Pada perencanaan program pengembangan UMKM ini, Dinas Koperasi dan UMKM menentukan serta menetapkan kegiatan yang ingin dilakukan seperti dengan menentukan waktu, prosedur, serta kebijakan-kebijakan yang nantinya berguna sebagai acuan dari perencanaan terhadap ke 3 program pengembangan UMKM ini, agar nantinya program pengembangan UMKM ini bisa berjalan dengan baik.

Selanjutnya fungsi kedua dari manajemen menurut John F.Mee adalah fungsi Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga organisasi dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan<sup>21</sup>. Pada fungsi pengorganisasian ini, Dinas koperasi dan UMKM Membagi pekerjaan kepada pegawainya, pertama apabila menyangkut bagian yang berhubungan dengan urusan kantor seperti perizinan dan pemberian bantuan dana maka berada di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM, yang menjadi tanggung jawab dari Kepala Bidang Bina usaha dan Fasilitas permodalan. Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Amrizal, Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan sebagai berikut:<sup>22</sup>

“...memang benar, apabila pelaku UMKM ingin meminjam dana serta mengurus izin usahanya maka mereka harus mengurus ke kantor, yang mana itu menjadi tanggung jawab dalam melayani mereka ialah kami dari bidang bina usaha dan fasilitas permodalan”

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>22</sup> Wawancara tanggal 25 Juli 2015 di Dinas Koperasi dan UMKM pukul 14.00 WIB

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam melaksanakan urusan perizinan dan pemberian dana pada pelaku UMKM berada pada bagian kantor itu sendiri, yang menjadi tanggung jawab dalam pemberian ini adalah bidang bina usaha dan fasilitas permodalan.

Sedangkan pada proses pelaksanaan pengembangannya dilakukan oleh Tenaga Pendamping Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Amrizal, Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan sebagai berikut :<sup>23</sup>

“...untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kota Padang, Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan metode tenaga pendamping. Maksudnya disetiap kelurahan diberikan satu orang tenaga pendamping. Gunannya adalah Tenaga Pendamping ini mendata, mengembangkan dan membina UMKM”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas koperasi dan UMKM Kota Padang menggunakan metode Tenaga Pendamping yang nantinya berguna sebagai mendata, membina, dan mengembangkan UMKM yang ada di masing-masing setiap kelurahan yang ada di Kota Padang, yang sesuai dengan ketiga program pengembangan UMKM tersebut. Dengan adanya Tenaga Pendamping dapat membantu Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan program pengembangan yang dibentuk oleh Dinas sendiri, yang nantinya akan berimbas kepada makin baik pelaku UMKM dalam mengembangkan UMKM nya.

Setelah perencanaan dan pengorganisasian dari fungsi manajemen menurut John F. Mee, maka perlu adanya sebuah motivasi yang diberikan agar karyawan

---

<sup>23</sup> Wawancara tanggal 25Maret 2015 di Dinas Koperasi dan UMKM pukul 14.00 WIB

pada sebuah organisasi biasa berjalan dengan baik. Motivasi adalah seluruh proses pemberian motif (dorongan) kepada karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna<sup>24</sup>.

Motivasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu hanya baru memberikan reward dan punishment pegawai Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Amrizal, Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan sebagai berikut :<sup>25</sup>

“...apabila pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan tupoksi yang diberikan dan lebih baik dalam pekerjaan maka mereka akan diberikan uang insentif sebagai bentuk penghargaan kepada para pegawai selain itu mereka akan tetap diberikan support serta dukungan dalam melaksanakan pekerjaan mereka”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bentuk motivasi seperti pemberian uang insentif, dan juga dalam melaksanakan pekerjaannya tetap diberikan support serta dukungan penuh dari pimpinan instansi yaitu Kepala Dinas. Sementara itu dalam pemberian punishment kepada pegawai maka para pegawai akan diberikan surat peringatan serta para tenaga pendamping tidak akan diberikan honor bulannya. Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Amrizal, Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan sebagai berikut:<sup>26</sup>

“...apabila para pegawai melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas mereka maka kami memberikan teguran secara langsung pada pegawai tersebut dan mengeluarkan Surat peringatan 1, 2 dan 3, sementara untuk Tenaga Pendamping

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>25</sup> Wawancara tanggal 25Maret 2015 di Dinas Koperasi dan UMKM pukul 14.00 WIB

<sup>26</sup> Wawancara tanggal 25Maret 2015 di Dinas Koperasi dan UMKM pukul 14.00 WIB

yang tidak menyelesaikan laporan bulanan nya maka dinas tidak membayarkan honor bulanan nya hingga mereka menyelesaikan laporannya. Itu merupakan bentuk sanksi yang kami berikan agar petugas pendamping dapat bekerja secara maksimal.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKMKota Padang memberikan punishment kepada para pegawai dalam bentuk teguran secara langsung pada pegawai tersebut dan mengeluarkan Surat peringatan 1, 2 dan 3, sementara kepada Tenaga Pendamping yang tidak menyelesaikan laporan nya kepada Dinas koperasi dan UMKM maka pembayaran honor akan ditunda. Hal ini dilakukan agar Tenaga Pendamping benar-benar melakukan pekerjaan dengan semestinya. Kebanyakan petugas lapangan sering tidak melakukan pekerjaan dengan secara maksimal.

Dalam pengembangan UMKM ini juga tidak terlepas dari pengawasan oleh berbagai pihak yang mana Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pihak yang mengawasi dalam jalanya Program Pengembangan UMKM tersebut, Menurut teori John F. Mee, Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>27</sup> Dalam melakukan pengawasan terhadap Program Pengembangan ini, Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan pengawasan langsung

Sementara itu dalam melaksanakan pengawasan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, terdapat adanya permasalahan yang terjadi seperti yang dijelaskan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Amrizal, Kepala Bidang Bina Usaha dan Fasilitas Permodalan sebagai berikut :<sup>28</sup>

“...permasalahan pada pengawasan itu terletak pada tahapan pelaporan, Tenaga Pendamping masih banyak yang terlambat memberikan laporan bulanan sehingga terkadang hasil evaluasi pun menjadi terlambat, selain itu pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap UMKM juga memiliki kendala, yaitu salah satunya masih ditemukan UMKM yang belum paham terhadap manajemen usaha”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam segi pengawasan adalah masih adanya Tenaga Pendamping yang terlambat membuat laporan bulanan, sehingga hasil evaluasi pun mejadi terlambat, selain itu kendala lain yang Dinas rasakan yaitu masih banyaknya pelaku UMKM yang belum paham terhadap manajemen usaha.

Dalam melaksanakan program pengembangan tersebut tentu diperlukan manajemen yang baik dan matang agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran program dapat terwujud dengan optimal. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam melasanakan Program Pengembangan UMKM ini, yang antara lain masih terdapat beberapa kendala seperti masih minimnya pengetahuan pelaku UMKM dalam manajemen usah, dan masih minimnya pengetahuan UMKM dalam melakukan Pengembangan terhadap usahanya

Bedasarkan fenomena-fenomena empiris yang peneliti temukan dilapangan, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti **Manajemen**

---

<sup>28</sup> Wawancara tanggal 25 Agustus 2015 di Dinas Koperasi dan UMKM pukul 10.00 WIB

## **Program Pengembangan Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang .**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Manajemen Program Pengembangan Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Program Pengembangan Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu terbagi dua yaitu manfaat secara praktis dan manfaat teoritis.

#### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Secara praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, acuan dan sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan UMKM Khususnya Di Kota Padang

#### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan serta sebagai kontribusi dalam Ilmu Administrasi Negara terutama dalam Manajemen suatu organisasi publik juga sebagai rujukan penelitian yang akan datang

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah terdiri dari enam bagian yang terdiri dari :

1. BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini peneliti mendeskripsikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dilaksanakan

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini peneliti menguraikan kerangka teori yang merupakan pedoman dari peneliti terdahulu yang relevan, landasan teori yang digunakan, definisi konsep, definisi operasional dan skema pemikiran peneliti.

3. BAB III Metode penelitian

BAB ini berisikan tentang metode penelitian yang peneliti pakai dalam meakukan penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan informan, peranan peneliti, unit analisis, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

4. BAB IV Deskripsi Lokasi Penelitian

BAB ini memberikan gambaran mengenai interaksi tempat akan dilakukannya penelitian tersebut mulai dari gambaran secara umum, visi

misi organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi sehingga sasaran dari Dinas Koperasi dan UMKM.

5. BAB V Temuan dan Analisis Data

Berisikan tentang data yang menguraikan tentang proses analisis dan pembahasan yang merupakan hasil dari observasi peneliti di lapangan

6. BAB VI Penutup

Berisikan VI Kesimpulan dan saran yang dapat memberikan simpulan dengan memaparkan hasil penelitian secara lebih singkat dan memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait

